

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRI DALAM
MENETAPKAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh :

NICOLE DANANG AGUNG SUJATMIKO

NPM : 160512577

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRI DALAM
MENETAPKAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**



Diajukan Oleh :

NICOLE DANANG AGUNG SUJATMIKO

NPM : 160512577

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Disetujui tanggal 22 Februari 2021
oleh**

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, stylized oval shape. The signature appears to be "A. Wisnubroto".

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRI DALAM
MENETAPKAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Februari 2021

Tempat : Melalui Sidang Online

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

~~Tanda Tangan~~

.....

.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti. S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

“KEMAUAN ADALAH JALAN”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan perlindungan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MENETAPKAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**. Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi dorongan dan bimbingan selama ini kepada yang terhormat:

1. Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan segenap jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah menuntun dan membimbing penulis dengan sabar sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
4. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan-bantuan dan pelayanan yang baik dari semester 1 hingga saat ini;

5. Bang AKP Kurniawan selaku Penyidik Siber Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan referensi sebagai dasar Penulisan Hukum/Skripsi ini.
6. Bapak Sapto Nugroho Wusono selaku Pimpinan Kantor Advokat SNW&Partners yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan referensi sebagai dasar Penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua Penulis Pak Jaksa Irianto Marpaung, Mama Dwi Astuti dan semua keluarga besar Marpaung dan Sudarno yang selalu mendukung dan merestui perjalanan hidup saya.
8. Penyemangat Saya dalam membuat Skripsi; Veronica Melany.
9. Indhayana Yudha, selaku Advokat yang memberikan pencerahan dan informasi penting kepada penulis untuk membuat Penulisan Hukum/Skripsi.
10. Sahabat-sahabat dan rekan Penulis yang tidak terlalu membantu yaitu Rio Tampubolon, Reinaldo Sitepu, Albertino Ollan, Andi Eli Logo, Tio Magelang, Juara Buluara, Rico Hendramaji, Gunung Tampubolon, Yosi Valentino, Guntur, Rendi Dharma, Gabriel David, Alfon Sitepu, Wilman Marpaung, Tommy Tanusasma, Dimas Lugas.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2016, dan teman-teman diluar sana yang selalu mendukung saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari dosen pembimbing, narasumber dan teman-teman semua penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi tentu banyak sekali kendala dan halangan yang dihadapi oleh Penulis, tapi Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dari pembaca untuk dapat membantu agar Penulisan Hukum/Skripsi ini menjadi sempurna. Akhir kata, semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Yogyakarta, 5 Januari 2021

Penulis



Nicole Danang Agung Sujatmiko

ABSTRACT

In law enforcement practices, especially in the investigation of criminal defamation through social media, still have legal problems. An investigator is often found determining someone's suspect, too hastily and too quickly. That is, have the investigators performed their duties and functions according to the law? Doesn't the investigator also have the authority in law to stop the investigation? The purpose of this legal research is to determine the extent to which investigators, especially the National Police, consider the status of a suspect in a criminal act of defamation through social media. In accordance with the results of the study which raised two cases of criminal defamation through social media as a comparison, investigations carried out by POLRI investigators are in fact quite good at carrying out the investigation process, in accordance with the applicable law. The fulfillment of two pieces of evidence in accordance with the law certainly makes investigators sure to determine the status of a person as a suspect in a criminal act during the investigation process. However, on the other hand, investigators forget the importance of seeking Restorative Justice during the investigation process. This has a function for and on the basis of fulfilling the rights of each party, outside of the criminal system. If this happens more frequently, it could lead to Overcriminalization of people affected by similar cases in the future.

Keywords : *Investigator, POLRI, Overcriminalization, Restorative Justice*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	17
BAB II.....	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Peran Penyidik POLRI Dalam Menetapkan Status Tersangka.....	19
1. Pengertian Penyidik POLRI.....	19
2. Tugas Pokok dan Kewenangan Penyidik POLRI.....	20
3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Penyidik POLRI dalam Penetapan Tersangka.....	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	27
1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	27
2. Aturan Hukum Positif terkait dengan Delik Pencemaran Nama Baik.....	32
3. Media Sosial dan masalah konten negatif.....	34
C. Pertimbangan Penyidik POLRI dalam Menetapkan Status Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial.....	36

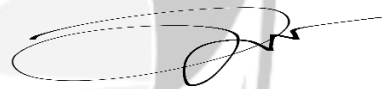
1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	36
2. Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Penetapan Tersangkanya Memerlukan Pertimbangan Lebih saat Proses Penyidikan oleh Penyidik POLRI.....	38
3. Hambatan Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial.....	53
4. Faktor-Faktor yang menjadi pertimbangan dalam Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial	55
5. Upaya Pengoptimalan Peran Penyidik saat melakukan Penyidikan hingga menetapkan status tersangka agar tidak terjadi overcriminalization.....	60
6. Penggunaan Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	66
BAB III.....	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Januari 2021

Yang menyatakan,



Nicole Danang Agung Sujatmiko

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindak kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan semakin pesat, sehingga akses seseorang untuk menyampaikan pendapat dan berkomentar melalui media sosial sangatlah memadai. Manusia sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab atas apa yang telah mereka ucapkan secara lisan dan tulisan, termasuk melalui media sosial.

Menurut McGraw Hill Dictionary media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Menurut B.K. Lewis (2010) media sosial adalah, label bagi teknologi *digital* yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media sosial, merupakan pembatasan akan

¹ Ambar, 20 Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli, <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, diakses 10 September 2020.

kebebasan berpendapat sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang keabsahannya telah dijamin oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Demikian UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media sosial konstitusionalitasnya harus saling terkait dengan istilah “penghinaan” yang diatur secara khusus dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Ketidaktepatan penanganan prosedur penyidikan pada pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP dalam penetapan status tersangka oleh penyidik terjadi pada saat Florence Sihombing dilaporkan ke polisi karna melakukan pencemaran nama baik sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3). Ucapan kekecewaan yang di ungkapkan melalui media sosial *Path* oleh Florence Sihombing yang bermula pada saat Florence sedang mengantre BBM di SPBU Lempuyangan, berbuntut dilaporkannya Florence oleh elemen masyarakat Yogyakarta ke POLDA DI.Yogyakarta. Penyidik menetapkan perbuatan tersebut sebagai sebuah tindak pidana dan terburu-buru menetapkan

² Butir 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/50/PUU-VI/2008, diakses 2 September 2020.

Florence Sihombing sebagai tersangka dan melakukan penahanan atas dasar tidak Kooperatif.³

Kejadian serupa juga dialami oleh *Stand-up* Komedian (Komika) Muhadkly MT alias Acho yang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap Apartemen *Green Pramuka City*. Berawal dari keluhan soal fasilitas apartemen yang merupakan hak sebagai konsumen, ditulis Acho di blog pribadinya sebagai ungkapan kekecewaan karena pihak pengembang apartemen tidak memenuhi janji untuk menjadikan area apartemen sebagai ruang terbuka hijau sesuai yang dijanjikan, muhadkly.com, sejak 8 Maret 2015. Beberapa bulan setelah tulisan itu muncul, kuasa hukum pengembang PT Duta Paramindo Sejahtera, Danang Surya Winata, melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada 5 November 2015. Acho dianggap melanggar pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik.⁴

Menurut penulis, dari kedua kasus tersebut terdapat permasalahan hukum dimana dari pihak kepolisian setelah menerima laporan dari pihak pelapor, penyidik kepolisian terlalu cepat untuk menetapkan status tersangka kepada terlapor dengan hanya memperhatikan unsur pembedaannya yang telah terpenuhi saja, tanpa memperhatikan fakta-

³ Mohammad Arief Hidayat, Kronologi Kasus Hinaan Florence Hingga Berujung Bui, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/533619-kronologi-kasus-hinaan-florence-hingga-berujung-bui>, diakses 22 Desember 2020.

⁴ Priska Sari Pratiwi, Kronologi Kasus Komika Acho Versus Apartemen Green Pramuka, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170806143342-12-232782/kronologi-kasus-komika-acho-versus-apartemen-green-pramuka>, diakses 28 Agustus 2020.

fakta lain yang mendukung tindakan terlapor, sehingga dalam beberapa kasus yang menyangkut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membuat penyidik sulit untuk membedakan dan menentukan mana korban dan mana pelaku terhadap rangkaian suatu kejadian secara umum dari waktu pertama kalinya ada sebab dan akibat suatu perbuatan. Dengan contoh dua kasus Tersangka Florence Sihombing dan Tersangka Muhadkly MT alias Acho seharusnya bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke pengadilan karena penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

Di dalam praktek penegakan hukum, tidak jarang tersangka lebih dahulu ditentukan padahal konstruksi hukumnya belum jelas atau tidak jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana. Jika itu yang terjadi, maka banyak perkara yang sudah ditentukan tersangkanya perkaranya dihentikan (SP3). Mestinya hal tersebut tidak perlu terjadi jika kepolisian memahami makna dari pengertian penyidikan. Dalam hal penyidikan, Penyidik belum menentukan tersangka dan hasil perolehan alat bukti dan barang bukti telah diketahui tidak cukup bukti atau bukan merupakan perbuatan pidana, apakah penyidik dapat menerbitkan SP3? Dalam praktek penegakan hukum, kepolisian mengambil “kebijakan” tidak mengeluarkan SP3, hanya terbatas memberikan SP2HP. Dengan kata lain, dalam praktek penyidikan SP3 baru dapat diterbitkan jika sudah ditentukan tersangkanya.⁵

⁵ Nur Basuki Winarno, 2011, *Beberapa Permasalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian*, Jurnal Hukum Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hlm. 123.

Oleh sebab itu melihat kondisi bahwa masih ada terjadi kekeliruan penyidik saat menggunakan kewenangannya dalam menetapkan status tersangka dalam beberapa kasus yang menyangkut dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang pertimbangan penyidik POLRI dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah “bagaimanakah pertimbangan penyidik POLRI dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan penyidik POLRI dalam menetapkan tersangka kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada bidang hukum pidana terutama untuk penyidik POLRI dalam pertimbangannya menetapkan status tersangka dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Dapat meningkatkan fungsi koordinasi dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta tepat menentukan status tersangka dalam proses penyidikan setiap kasus yang menyangkut dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

b. Masyarakat Warga Negara Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat untuk bebas mengekspresikan diri di sosial media sesuai dengan hak asasinya sebagai manusia yang juga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, namun tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) dengan

mengedepankan norma kesopanan dan kesantunan supaya tidak melanggar hak asasi orang lain.

c. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis untuk dapat memenuhi syarat sebagai kelulusan pada Strata-1 Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul pertimbangan penyidik POLRI dalam menetapkan status tersangka kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ini bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan karya asli dari penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi yaitu:

1. Mustakima Bakri, NIM: 10300111045, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015.

Judul Skripsi: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam).

Rumusan Masalah: Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan yang dirumuskan penulis adalah Bagaimana Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media sosial (Studi Komperatif antara hukum positif dan hukum Islam). Dari pokok masalah tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum

positif dan hukum Islam? 2. Bagaimana sanksi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial menurut UU ITE? 3. Bagaimana sanksi pencemaran nama baik dalam hukum Islam?

Hasil Penelitian: Dalam hidup ini setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya terjaga, seperti halnya jiwa, kehormatannya dan nama baik seperti manusia juga harus dilindungi.. Adapun jenis sanksi dalam hukum pidana Islam terdiri dari sanksi yang terberat dan yang ringan. Yang termasuk kategori terberat yaitu menuduh wanita baik-baik zina berupa hukuman dera sebanyak delapan puluh (80) kali dan tidak menerima kesaksian atau mempercayai pernyataannya untuk selama-lamanya. Sedangkan yang ringan yaitu seperti menghina, memberi gelar yang buruk, ghibah, membuka aib hukumannya berupa ta'zir, yakni diserahkan kepada ulil amri untuk diberi sanksi yang bersifat pendidikan, karena al-Quran dan Hadis tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya.

2. Aditya Burhan Mustofa E, 0005001, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Judul Skripsi: Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana

Rumusan Masalah: Bagaimanakah bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana? Bagaimanakah sistem pengaturan terhadap tindak pidana

pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana?

Hasil Penelitian: Sistem Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana adalah sebagai berikut : a. Secara umum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP sebagai payung hukum pidana. Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/ penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP b. Secara khusus, dalam kaitannya dengan media yang digunakan yaitu media internet yang digunakan untuk tindak pidana pencemaran nama baik, maka juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36.

3. Muchammad David Faishal, (102211021), Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Judul Skripsi: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK).

Rumusan Masalah: Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan sanksi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik?

Hasil Penelitian: Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengambil putusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT. YYK melihat dari segi hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis). Dari segi hukum (yuridis) dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangkanketerangan yang ada dalam persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Dari segi non hukum (non yuridis) seperti pertimbangan Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya, Mustakima Bakri menekan pada Studi komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam dalam kasus tindak pencemaran nama baik melalui media sosial, Aditya Burhan Mustofa E menekankan pada tinjauan dari perspektif hukum pidana mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet, Muchammad David Faishal menekankan pada dasar pertimbangan hukum dan sanksi putusan Pengadilan Tinggi

Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik. Penulis menekankan pada pertimbangan penyidik POLRI dalam menetapkan status tersangka kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

F. Batasan Konsep

1. Penyidik

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (1) pengertian Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Polisi diartikan sebagai Badan Pemerintah (pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum ⁶. Dalam hal ini, penyidik yang dimaksud oleh peneliti adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

2. Tersangka

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka (7) pengertian Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, tersangka yang dimaksud oleh peneliti adalah:

⁶ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hlm. 453.

keadaan seseorang yang karena perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana oleh penyidik POLRI dalam proses penyidikan.

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah perbuatan mengotori penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya yang dilakukan secara disengaja. Menurut KUHP Pasal 310 ayat (1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam hal ini pencemaran nama baik yang dimaksud peneliti adalah sesuai dengan KUHP Pasal 310 ayat (1) yaitu barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

4. Media Sosial

Media sosial adalah teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan. Dalam hal ini, media sosial yang dimaksud peneliti adalah teknologi

digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan yang menjadi objek wadah atau sarana terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian mengenai pertimbangan penyidik POLRI dalam menetapkan status tersangka kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Fakultas Hukum UAJY, 2019, *Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi dan Legal Memorandum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 6.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
7. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
9. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, data statistik yang didapat dari instansi/ lembaga resmi, serta pendapat narasumber yang berkaitan dengan topik skripsi yaitu pertimbangan penyidik POLRI dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum

tersier berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.

- b. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan yang sudah disiapkan yang berkaitan dengan penelitian dan ditanyakan kepada ahli yang dituju sesuai dengan penelitian.

4. Narasumber

Penelitian ini didukung oleh keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai profesi dan keahlian yang dimilikinya, maka narasumber dalam penelitian ini adalah:

- Kasubdit V/ SIBER Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta:
KOMPOL I NENGAH SADIARTA, S.H., S.I.K
- SNW&Partners (Kantor Pengacara), Jl. Jambon No. KM 1.5,
Biru Tringhaggo, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta, 55291:
SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H., M.H.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap Hukum Positif yang berlaku seperti Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VII/2008, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran sesuai permasalahan yaitu pertimbangan penyidik POLRI pada penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menetapkan status tersangka saat proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik.

6. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang berdasar dari suatu pengetahuan yang umum yang kebenarannya telah diketahui, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang umum berupa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Kemudian ke hal-hal

yang bersifat khusus berupa pertimbangan penyidik POLRI dalam menetapkan status tersangka kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Berisi mengenai, Pertama; tinjauan umum mengenai peran Penyidik POLRI dalam menetapkan status tersangka setelah itu akan dijabarkan mengenai pengertian POLRI, tugas pokok dan kewenangan POLRI, serta dasar hukum dan pertimbangan Penyidik POLRI dalam menetapkan status Tersangka. Kedua; tinjauan umum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial setelah itu akan dijabarkan mengenai pengertian tindak pidana pencemaran nama baik, aturan hukum positif terkait dengan delik pencemaran nama baik, pengertian media sosial dan masalah konten negatif. Ketiga; pertimbangan Penyidik POLRI dalam menetapkan status Tersangka tindak

pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang setelah itu akan dijabarkan mengenai proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, contoh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang penetapan tersangkanya memerlukan pertimbangan lebih saat proses penyidikan oleh Penyidik POLRI pada kasus penetapan Tersangka Florence dan Tersangka Muhadkly MT alias Acho, hambatan penyidik POLRI dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, upaya pengoptimalan peran Penyidik saat melakukan penyidikan hingga menetapkan status tersangka agar tidak terjadi *overcriminalization*, serta penggunaan Keadilan Restoratif dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB III: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah terkait, serta saran terhadap hasil penelitian.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu; Didalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penyidikan guna menetapkan status tersangkanya seorang terduga tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, Penyidik memiliki faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Penyidik tersebut adalah terpenuhinya minimal dua (2) alat bukti sesuai dengan yang telah tercantum didalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terpenuhinya unsur pidana yang melekat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pendapat dari Ahli Bahasa yang menyatakan bahwa kalimat yang disampaikan oleh seorang terduga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik memang benar memiliki maksud ataupun muatan penghinaan seperti yang dimaksud pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan ini lah yang digunakan penyidik untuk menetapkan status tersangka seorang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dikhawatirkan dikemudian hari akan muncul ketidakadilan bagi terduga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam hal ini, maka penulis memiliki saran dalam rangka meningkatkan tugas dan kewenangan Penyidik saat melakukan pertimbangan dalam menetapkan status tersangka seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, yaitu; Penyidik yang memiliki kewenangan dalam Penyidikan diharapkan agar lebih proaktif untuk mengedepankan upaya *Restorative Justice* untuk mengutamakan dan fokus pada pemenuhan hak korban, apalagi dengan kondisi Terlapor yang mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggungjawab untuk mengembalikan hak-hak Pelapor yang merasa dirugikan. Mengingat perkara pencemaran nama baik bukanlah perkara yang efektif untuk diselesaikan dengan sanksi pidana karena kesalahpahaman mengenai berbahasa itu bisa saja terjadi di Negara Indonesia yang multikultural. Dalam hal ini kaitannya supaya tidak terjadi *Overcriminalization* pada Terlapor nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Hakim G. Nusantara, 1996, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.

Fakultas Hukum UAJY, 2019, *Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi dan Legal Memorandum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

G.W Bawengan, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Introgasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Penerbit MELTON PUTRA, Jakarta.

Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Atmajaya Pres, Yogyakarta.

Nasrullah, Rulli. 2016. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi*, Penerbit Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor, Bogor.

R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Jurnal :

Nur Basuki Winarno, 2011, Beberapa Permasalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian, *Jurnal Perspektif Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Internet :

Ambar, 2011, *Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli*, <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, diakses 10 September 2020.

Mohammad Arief Hidayat, Kronologi Kasus Hinaan Florence Hingga Berujung Bui, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/533619-kronologi-kasus-hinaan-florence-hingga-berujung-bui>, diakses 22 Desember 2020.

Priska Sari Pratiwi, Kronologi Kasus Komika Acho Versus Apartemen Green Pramuka, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170806143342-12-232782/kronologi-kasus-komika-acho-versus-apartemen-green-pramuka>, diakses 28 Agustus 2020.

Ridwan Aji Pitoko, Isi Kritik Komika Acho Soal Apartemen Green Pramuka Yang membuatnya jadi Tersangka, <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/06/12010711/isi-kritik-komika-acho-soal-apartemen-green-pramuka-yang-membuatnya-jadi?page=all>, diakses 22 Desember 2020.

<https://kbbi.web.id/bahan-2>, diakses 16 September 2020.

<https://kbbi.web.id/tetap>, diakses 16 September 2020.

<https://kbbi.web.id/kasus>, diakses, tanggal 16 September 2020.

<https://kbbi.web.id/cemar>, diakses tanggal 16 September 2020

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 10 September 2020.

Peraturan Per-Undang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

